

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses transformasi BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan penerapan regulasi yang tegas serta terstruktur. Meskipun BUM Nagari Kopamu Sejahtera telah berhasil menjalani proses ini dan menjadi badan hukum, banyak BUM Nagari lainnya di Kecamatan Mungka yang belum mampu memenuhi kewajiban tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah, perangkat nagari, dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi, pendampingan teknis, serta pengawasan yang efektif agar semua BUM Nagari dapat mematuhi regulasi dan menjalankan usaha mereka secara legal dan profesional.
2. Beberapa kendala transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, menunjukkan bahwa kendala utama dalam proses transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, meliputi ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman mengenai prosedur, minimnya pendampingan ahli, serta kurangnya koordinasi dan perhatian dari pemerintah nagari. Kendala-kendala ini disebabkan oleh faktor administratif, rendahnya pelatihan, dan kurangnya komitmen pengurus BUM Nagari terhadap pengelolaan dan legalitas usaha. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan pendampingan dan

pelatihan bagi pengurus, memperkuat koordinasi antara pemerintah nagari dan BUM Nagari, penyediaan anggaran yang memadai, serta penyuluhan tentang pentingnya status badan hukum untuk mendorong transformasi BUM Nagari secara profesional dan legalitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus BUM Nagari

Salah satu kendala yang ditemukan adalah ketidaklengkapan dokumen administratif dan kurangnya pemahaman pengurus mengenai prosedur transformasi. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi pengurus BUM Nagari. Pelatihan ini sebaiknya mencakup materi tentang penyusunan dokumen administratif yang tepat, pemahaman mengenai peraturan yang berlaku, serta prosedur hukum yang perlu diikuti. Selain itu, pengurus harus dilatih dalam manajemen BUM Nagari, agar dapat menjalankan organisasi secara profesional.

2. Pendampingan dari Tenaga Ahli

Mengingat minimnya pendampingan dari tenaga ahli, disarankan agar pemerintah daerah bekerjasama dengan tenaga ahli atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang transformasi badan hukum untuk memberikan bimbingan langsung kepada pengurus BUM Nagari. Pendampingan ini dapat membantu pengurus dalam memahami setiap langkah dalam proses transformasi, mulai dari penyusunan dokumen, pendaftaran NPWP, hingga tahapan akhir perubahan status menjadi badan

hukum. Pendampingan ini juga dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi dalam proses administratif dan hukum.

3. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Nagari dan Pengurus BUM Nagari

Pemerintah nagari perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung proses transformasi BUM Nagari menjadi badan hukum. Salah satu langkah strategis adalah dengan membentuk tim khusus yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi terkait BUM Nagari. Tim ini dapat bertugas memberikan pendampingan teknis, memfasilitasi pelatihan, dan membantu pengurus BUM Nagari dalam mempersiapkan dokumen serta memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, pemerintah nagari juga perlu meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pengurus BUM Nagari untuk memastikan bahwa setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi. Dengan adanya kolaborasi yang baik, proses transformasi BUM Nagari menjadi badan hukum dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

